



Buletin Parlementaria

Nomor 1008/IV/V/2018 • Mei 2018



Indonesia Darurat Terorisme

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN



9 772614 339005

Tak Ada Fraksi yang Tolak Tuntaskan RUU Terorisme



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Delegasi DPR di Mapolrestabes Surabaya

Indonesia Darurat Terorisme

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia sudah memasuki darurat terorisme. Serangan demi serangan terorisme masih terus terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, ia menegaskan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti Terorisme) akan segera disahkan pada masa sidang DPR di bulan Mei ini.

“Belum usai luka rusuh napi terorisme di Rutan Mako Brimob beberapa hari lalu, kini serangan terorisme kembali terjadi lagi di Surabaya. Indonesia sudah masuk darurat terorisme. Negara jangan lagi memberikan ruang bagi terorisme tumbuh subur di tanah air,” ujar Bamsot, begitu ia biasa disapa. Oleh karena itu, DPR meminta

Badan Intelijen Negara (BIN) dan aparat Kepolisian segera mengusut tuntas motif dan pelaku pemboman secara profesional, objektif dan seksama. Penjagaan di tempat-tempat ibadah juga perlu lebih ditingkatkan lagi, mengingat serangan terhadap tempat ibadah merupakan serangan terencana. TNI juga harus bersatu membantu Polri dalam menumpas

jaringan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai badan yang bertugas mengatasi masalah terorisme, harus lebih aktif dan tegas mengantisipasi pergerakan terorisme.

Masyarakat juga jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Semuanya saya minta tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya masalah pengamanan kepada aparat Kepolisian



Foto: dokpri/hr

3. BILA MALAM HARI
DAN MENYALAKAN L

4. TURUN DARI KENDARA
MELAPOR KEPADA PI

5. PEMERIKSAAN KENDARA
BARANG BAWAAN OI

6. MENINGGALKAN KAR
PENJAGAAN DAN ME
PENGUNJUNG.

7. BILA SELESAI MENGE
DAN MENGEMBALIKA

Tidak hanya itu, Bamsuet juga meminta masyarakat turut aktif berpartisipasi melaporkan kepada aparat keamanan setempat jika menemukan atau mengetahui hal-hal yang mencurigakan.

“Masyarakat juga jangan mudah terprovokasi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Semuanya saya minta tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya masalah pengamanan kepada aparat Kepolisian,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut, Bamsuet menegaskan RUU Anti Terorisme yang sedang dibahas DPR dan pemerintah akan segera disahkan pada masa sidang DPR di bulan Mei ini. Meski demikian, ia meminta pemerintah satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU Terorisme tersebut.

“Presiden minta RUU Anti Terorisme selesai paling lambat bulan Juni. Kami di DPR RI menegaskan siap untuk ketuk palu di bulan Mei ini. Tinggal pemerintah menyelesaikan masalah di internalnya agar satu suara dalam menyikapi revisi UU Anti Terorisme ini,” tegasnya usai meninjau lokasi ledakan bom di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5).

Pada kesempatan itu, ia juga meminta aparat Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya harus mampu bertindak tegas tanpa takut melanggar hak asasi manusia (HAM). Aparat Kepolisian harus menyusup masuk ke dalam sel-sel kelompok teroris. Tanpa menunggu teroris melancarkan aksi teror, aparat Kepolisian bisa langsung menangkap dan memeriksa jika dirasa ada dugaan kuat dan bukti yang cukup.

“Kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan. Kalau ada pilihan antara HAM atau menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara, saya akan memilih menyelamatkan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal HAM, kita bahas kemudian. Terbukti kita proses hukum, tidak terbukti dilepaskan. Jangan kasih ruang bagi teroris untuk berlindung dibalik nama HAM,” tandas Bamsuet yang langsung menggelar rapat dengan Kapolri, Kapolda Jawa Timur, Kakor Brimob serta jajaran Kepolisian di Mapolrestabes Surabaya. ■ ayu/sc

“Saya atas nama DPR dan seluruh rakyat Indonesia kembali menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Saya juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan serangan bom yang terjadi. Karena, persoalan yang terjadi bukanlah konflik antar agama. Tapi perbuatan orang-orang biadab tanpa perikemanusiaan yang tidak peduli anda beragama Kristen, Budha bahkan Islam sekalipun. Mereka bunuh tanpa ampun. Mereka seakan menikmati jeritan para korban dan tangisan anak-anak,” paparnya

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merapatkan barisan. Kinilah saatnya kita berjihad membela negara.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Effendi

SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldni Opie

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Foto: Oji/hr

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI)

Fadli Zon Dukung Penyetaraan Status Perangkat Desa

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendukung upaya penyetaraan status perangkat desa dengan golongan II Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diharapkan mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.

“Penyetaraan ini masuk akal karena perangkat desa hadir untuk memberikan pelayanan kepada publik dan mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat,” ungkap Fadli usai menerima Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) di ruang kerjanya Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

Fadli menjelaskan, sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa. Namun turunan dari UU yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ini

dirasa tidak berpihak pada kebutuhan perangkat desa. Untuk hal tersebut, PPDRI menghadap DPR dapat menyuarakan keinginan mereka merevisi PP tentang perangkat desa.

“Misalnya saja, pemberian upah yang tidak jelas atau tidak ada standarisasi, antar desa berbeda upah untuk perangkat desanya. Ini perlu diatur,” tuturnya.

Selain itu, adanya bongkar pasang perangkat desa juga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat. “Jadi ketika ada Kepala Desa baru terpilih mereka membawa seperangkat pendukung, ini

tidak sesuai dengan harapan mereka, ini juga perlu diatur,” jelasnya.

Lebih lanjut Politisi Gerindra ini menyampaikan bahwa dalam forum juga disampaikan mengenai pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan tepat sasaran. “Kita melihat ada penyimpangan yang terjadi di desa, anggaran itu dikelola tidak transparan, ini harus ada evaluasi yang komprehensif, karena diharapkan melalui dana desa bisa memajukan Indonesia dari pinggir,” harapnya.

Diakhir pertemuan, wakil rakyat dari dapil Bogor itu berjanji akan memperjuangkan dan meneruskan semua aspirasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri serta akan ditindaklanjuti di Komisi II DPR. ■ rnm/sc

DPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia - Denmark

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Denmark telah terbangun dengan sangat baik. Persahabatan yang telah terbangun selama ini, menegaskan kehangatan dan keakraban hubungan baik antara kedua negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong adanya peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Kerajaan Denmark.



Foto: Sofyan/hr

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersama Dubes Indonesia untuk Kerajaan Denmark

banyak masyarakat Denmark yang tidak mengetahui dan mengenal Indonesia. Namun setelah ada penjelasan dari Dubes dan seluruh jajaran KBRI, serta berbagai promosi mengenai kuliner dan pariwisata Indonesia, kini banyak masyarakat Denmark antusias ingin datang ke Indonesia.

Di sisi lain, Taufik berharap KBRI Kopenhagen dapat terus menunjukkan kinerja yang baik, profesional, dan optimal sehingga DPR dapat mendorong Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri. "Bagaimanapun juga KBRI merupakan ujung tombak diplomasi Indonesia dan berjasa memperkenalkan Indonesia ke negara sahabat. Untuk itu, kami menilai wajar jika KBRI yang berkinerja baik mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat," tandas Taufik.

Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Kerajaan Denmark Muhammad Ibnu Said mengatakan, hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Denmark saat ini sudah sebagai mitra strategis. Menurutnya, saat ini peningkatan kerja sama difokuskan pada bidang ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, infrastruktur, maritim, dan pendidikan.

"Ada kendala dalam bisnis menurut para pengusaha terkait dengan perlu adanya kepastian regulasi, perpajakan, masalah penguasaan lahan atau pertanahan, juga terkait masalah perburuhan, dan infrastruktur. Semua itu dapat kita atasi dengan memberikan pemahaman dan pengertian bahwa Indonesia saat ini merupakan negara yang transparan dan akuntabel dalam peningkatan hubungan kerja sama ekonomi," jelas Ibnu.

Sementara terkait pariwisata, Ibnu menjelaskan, kunjungan wisatawan Denmark ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 terdapat 27 ribu kunjungan dan meningkat menjadi 47 ribu kunjungan pada tahun 2017. Kemudian untuk bidang investasi, ia berharap adanya peningkatan terkait dengan *renewable energy*, dan perdagangan, khususnya peningkatan ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke Denmark. ■ **sf/sc**

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat memimpin kunjungan delegasi DPR ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kopenhagen, Denmark, Jumat (11/5). Dalam kunjungan yang diikuti Anggota Dewan lintas komisi dan fraksi itu, delegasi diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Denmark Muhammad Ibnu Said dan seluruh staf KBRI Kopenhagen di Wisma Duta KBRI Kopenhagen.

"Kami ingin memperdalam potensi kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark. Dalam kapasitas kami sebagai Pimpinan DPR, untuk membantu dan memperlancar kerja sama antar pihak eksekutif kedua negara. Kami juga ingin melihat lebih jauh isu-isu terkait ekonomi global yang ada di Denmark," kata Taufik di sela-sela pertemuan.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, ada hal yang menarik dalam hubungan kerja sama kedua negara. Menurutnya, Denmark ahli di bidang farmasi dan pertanian, sehingga ini menjadi salah satu hal yang penting dalam pemajuan teknologi di Indonesia. Ia menilai, Denmark juga piawai dalam pengelolaan energi, khususnya *renewable energy* (energi terbarukan).

"Potensi-potensi pusat energi terbarukan, non fosil dan ramah lingkungan banyak dikembangkan di Denmark. Misalnya pembangkit listrik sumber daya angin, termasuk industri radar. Ini beberapa hal yang ingin kami dapatkan dalam kunjungan ke Denmark ini," imbuh Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Dari pertemuan ini juga terungkap potensi kerja sama bidang pariwisata antara kedua negara yang cukup tinggi. Informasi yang disampaikan oleh Dubes, sebelumnya



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Tak Ada Fraksi yang Tolak Tuntaskan RUU Terorisme

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan sejak awal tidak ada satu pun fraksi yang menolak penyelesaian RUU Terorisme. Menurutnya, semua fraksi di DPR RI mendukung penyelesaian RUU Terorisme, termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah. RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bukan antiterorisme.

“Semua fraksi mendukung penyelesaian RUU Terorisme itu. Sehingga tidak benar kalau disebut ada fraksi yang menunda-nunda. Hal itu karena kebutuhan untuk semuanya, sehingga harus segera disahkan,” tegas Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (15/5).

Politisi F-Demokrat ini memaparkan, dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu semua fraksi sepakat untuk membawa ke paripurna untuk disahkan. Hanya sempat muncul penundaan yang berasal dari pemerintah, karena ada yang perlu diseragamkan.

Dengan demikian, lanjutnya, jika frasa tentang terorisme telah diseragamkan,



Foto: Arief/hr

maka RUU Antiterorisme dapat selesai pada bulan Juni 2018 mendatang. RUU tersebut akan dibahas kembali setelah masa reses DPR berakhir.

“Jika sudah seragam dan DPR sudah menyetujui, pimpinan DPR tentu akan menyesuaikan dengan keinginan pemerintah dan segera bisa disahkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta RUU Antiterorisme segera diselesaikan. Hal ini terkait dengan munculnya rentetan aksi terorisme mulai dari kerusuhan di Mako Brimob, hingga bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, dalam sepekan ini. Jokowi menargetkan RUU tersebut selesai Juni 2018. ■ ann/sc

Fahri Hamzah Tegaskan Pelaku Teror dan Bom Bunuh Diri Tidak Paham Agama

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pelaku teror bom tidak paham agama, dan bahkan mereka tidak memiliki ulama. Jangankan syariat dalam perang, sementara syariat dalam hidup yang damai saja mereka tidak paham.



Foto: Andri/hr

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

“Mereka bukan orang Islam, mereka robot yang diprogram untuk misi merusak nama agama Islam secara simbolik,” tegas Fahri lewat pesan singkat yang diterima Parlemen, Selasa (15/5) terkait beberapa aksi peledakan bom di Surabaya kemarin.

Betulkah mereka robot? Fahri menceritakan kasus robot lain yang dimaksud, yakni ketika suatu hari George Bush Jr menyerang Iraq dan membunuh Saddam Husein, serta membuat perang sipil dan pengungsian yang mengorbankan jutaan jiwa dengan alasan fiktif “senjata pemusnah massal”.

“Mereka, menganggap diri membela agama, tapi tidak punya maraji’ (rujukan), tidak bermazhab,

tidak paham bahasa Arab. Bukan itu saja, pelaku teror bom, orang yang tidak punya organisasi, sosial atau politik, juga tidak pernah haji atau umroh,” jelasnya.

Setelah meninggal, lanjut Fahri, biasanya baru terungkap hidupnya tertutup, jarang bergaul. Jika perempuan bercadar, dikenal sebagai orang biasa saja, dan lain-lain identitas yang intinya adalah bahwa ia “punya dunia sendiri” yang tidak pernah tidak terlacak.

Ditambahkannya, pelaku terror tidak mengerti Islam, karena menyerang rumah ibadah, membunuh ibu dan anak-anak itu jelas-jelas dilarang dalam perang dan damai. “Memang mudah menumbuhkan jenggot, tidak dicukur, memakai celana cingkrang, atau perempuan bercadar untuk mengelabui manusia, tapi Allah Maha Tahu. Mereka tidak mengerti Islam, jika mereka mengerti apa yang dilarang agama, tidak mungkin mereka menyerang rumah ibadah, membunuh ibu dan anak-anak,” sebut politisi dari Dapil NTB ini.

Sebab, tambah Fahri, jika memang mereka ingin mati sebagai syuhada, mengapa menyerang tempat yang diharamkan agama? Mengapa tak menunggu mati di bulan suci?.

Diakhir pernyataannya tidak lupa Fahri menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Surabaya tersebut. Lebih lanjut ia meminta aparat bertindak tegas dengan menumpas habis sel-sel teroris di Indonesia. ■ ayu/sc



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

Foto: Iwan/hr

Satya Dorong Tuntaskan RUU Anti-Terrorisme

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menegaskan, bahwa segala bentuk aksi terorisme yang terjadi di Indonesia harus diberantas karena akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Karena itu, payung hukum atas tindakan terorisme harus diperkuat.

Politisi F-Golkar ini menjelaskan, bom bunuh diri yang terjadi Minggu pagi di tiga Gereja di Surabaya merupakan aksi terorisme yang tidak bisa ditolerir. Menurutnya, negara tidak boleh kalah terhadap tindak kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa masyarakat sipil dan aparat keamanan tersebut.

“Payung hukum tindak kejahatan terorisme harus diperkuat. Anggota Pansus RUU Terorisme dari F-PG kita dorong agar

aktif menuntaskan RUU terorisme segera dengan memperhatikan situasi negara yang genting atas aksi terorisme baru-baru ini,” papar Satya dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (14/5).

Satya mengakui, pembahasan RUU Anti-terorisme sampai saat ini masih belum selesai. Dengan adanya rentetan kejadian aksi terorisme dalam sepekan ini, maka RUU Anti-terorisme dipandang sangat urgen untuk kembali dibahas dan segera dituntaskan.

“Rentetan aksi terorisme saat ini menumbuhkan semangat bersama, bahwa RUU Anti-terorisme sudah sangat mendesak. Kita harap segera dituntaskan. Kita menunggu respon pemerintah untuk duduk bersama kembali, agar RUU Anti-terorisme bisa disahkan dalam masa sidang berikutnya,” bebernya.

Politisi dapil Jawa Timur yang kediamannya hanya berjarak 100 meter

dari TKP bom bunuh diri di Gereja Santa Maria di Ngagel, Surabaya tersebut mengharapkan pihak pemerintah juga segera satu suara dalam menuntaskan RUU Anti-terorisme.

“Saya mendengar, mayoritas fraksi di Pansus RUU Anti-terorisme di DPR sudah sepaham dan bersatu, tinggal menunggu di pihak pemerintah yang nampaknya belum satu suara, karena setiap merumuskan satu kalimat atau paragraf, pemerintah selalu minta waktu kembali untuk membahas secara intern di pemerintah. Jadi bolanya justru ada di pemerintah, kita selalu menunggu,” tegas Satya.

Bahkan, sambung Satya, jika memang dinilai sangat urgen dan mendesak karena ada situasi darurat nasional atas aksi terorisme, pemerintah bisa mengeluarkan Perppu. “Saya yakin DPR pun akan segera merespon positif,” pungkasnya. ■ ann/sc

Kasus Terorisme Mengandung Propaganda Asing

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyampaikan, maraknya kasus terorisme mengandung propaganda asing yang bisa mengancam kedaulatan negara. Masalah terorisme bukanlah persoalan yang enteng, harus diatasi dengan serius dengan strategi keamanan dan pertahanan negara yang mutakhir. Hal tersebut disampaikan saat acara Forum Legislasi dengan tema ‘RUU Teroris Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror??’

“Karena kita sadar ada unsur-unsur propaganda asing dalam kasus-kasus terorisme.

Bahkan intelegen-intelejen asing itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan terorisme internasional,” jelas Nasir di ruang diskusi wartawan, Gedung DPR RI Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5).

Politisi dari Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) ini, bahkan memberikan contoh, “Mereka bisa masuk dalam jaringan Al-Qaidah, bisa masuk dalam jaringan Jamaah Islamiah. Jangan pikir gak bisa, bisa dia masuk. Jadi kemampuan mereka melakukan penetrasi itu luar biasa,” papar Nasir.

Menurutnya dalam konteks penanganan terorisme, sebenarnya dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang TNI,

dan Undang-Undang tentang Tindak Pidanan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 sudah ada pengaturan tentang penanganan teror, namun belum sempurna. Karena itu berangkat dari Perppu.

“Itu kan sudah mengatur, memang pengaturannya belum sempurna. Karena dulu itu Perppu, lalu disahkan menjadi undang-undang. Sudah ada apa yang harus dilakukan polisi dan apa

Revisi RUU Terorisme, Bisa Cegah Rencana Teror



Foto: Rumi/hr

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (kanan) dan Nasir Djamil (kiri) saat konferensi pers di gedung Nusantara III DPR RI

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan dalam Revisi Undang-Undang Terorisme yang akan disahkan nanti, aparat keamanan akan diberikan kewenangan pencegahan yang lebih maksimal. Menurut Anggota Pansus RUU Terorisme ini dalam RUU tersebut akan ada pasal yang bisa mempidanakan perbuatan persiapan teror. Penjelasan tersebut dia sampaikan saat acara Forum Legislasi dengan tema 'RUU Terorisme Dikebut, Mampu Redam Aksi Teror??'

dalam RUU yang baru bisa dipidana.

"Nah nanti di undang-undang yang baru itu bisa, tapi harus tetap dibuktikan bahwa dia pergi ke sana dan menjadi anggota teroris," ujar Arsul.

Dia pun memaparkan contoh yang lain, yang masuk dalam kategori perbuatan persiapan teror sehingga bisa dipidana adalah, kalau warga Indonesia pergi ke Suria atau ke Irak, lalu dia bergabung sebagai kombatan di sana dan bergabung dalam kelompok organisasi gerakan yang kemudian itu diidentifikasi sebagai gerakan teroris. Setelah pulang ke Indonesia orang semacam ini bisa dilakukan proses hukum sebagai tindakan pencegahan. ■ eko/sc

“ Dengan undang-undang yang baru asal bisa dibuktikan bahwa dia terasosiasi terkoneksi dengan kelompok atau organisasi teroris maka itu bisa diproses pidana, karena perbuatan pelatihannya itu akan dikonstruksikan sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan teror,” papar Arsul di ruang diskusi wartawan, Nusantara III, Selasa (15/5).

Dia pun memberikan contoh perbuatan persiapan teror yang dimaksudnya, seperti orang yang sudah beribait atau menyatakan diri ikut organisasi atau kelompok teroris. Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan militer, seperti nembak, memanah, berlatih menggunakan pedang dan sebagainya, itu kalau menurut undang-undang yang lama tidak bisa dipidana, tapi

yang harus dilakukan TNI,” ujar Nasir.

Menurutnya TNI juga memiliki tanggung jawab tugas selain operasi militer, jadi ada operasi militer selain perang yakni untuk menaklukan terorisme. Lalu kenapa undang-undang yang lama direvisi, Nasir menjelaskan, karena ada dinamika dan ada perkembangan terorisme yang kemudian tidak bisa dilakukan dengan undang-undang lama. ■ eko/sc

Mereka bisa masuk dalam jaringan Al-Qaidah, bisa masuk dalam jaringan Jamaah Islamiah, Jangan pikir gak bisa, bisa dia masuk.



Foto: Rumi/hr

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

Foto: Ojji/hr

Diperlukan Solidaritas Untuk Lawan Terorisme

Sejumlah 14 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan korban luka-luka akibat teror bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Serangan teror tersebut terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, antara pukul 06.00 hingga 08.00 WIB, Minggu (13/5).

Peristiwa teror bom di Kota Surabaya menjadi sebuah peringatan bagi semua pihak. Rasa solidaritas sangat diperlukan untuk melawan dan mencegah merebaknya terorisme mulai dari lingkungan keluarga. Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam berita rilisnya, Minggu (13/5).

“Lindungi perempuan dan anak-anak kita dari pengaruh ajaran ekstremisme. Kita mengutuk serangan bom pada tiga gereja di Surabaya yang terjadi pagi ini.

Bagaimanapun, tidak ada tempat untuk terorisme di Indonesia,” tandas Hetifah.

Hetifah menyampaikan rasa turut berduka bagi seluruh keluarga korban. Tuhan bersama orang-orang yang berada di jalan yang benar. Surabaya kuat, Indonesia kuat, sambungnya. “Saya mengajak perempuan dan generasi muda Indonesia untuk melindungi diri dari pengaruh paham radikalisme dan selalu mewaspadai aksi terorisme,” ujarnya.

Seperti dikabarkan media, serangan bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya,

Peresmian Kedutaan AS di Yerusalem Dinilai Suburkan Terorisme

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengemukakan sikap keras Presiden AS Donald Trump yang bersikukuh meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem meskipun dihujani kecaman masyarakat internasional.

“Dunia sebelumnya ramai-ramai mengemukakan rencana pemindahan Kedutaan AS pada Desember tahun lalu. Tapi yang kita lihat sekarang justru Trump melenggang meresmikan Kedutaan AS di Yerusalem. Ini jelas sinyal kuat sangat lemahnya dunia di hadapan Trump. Jika berdiam diri, saya khawatir sentimen anti-AS akan meluas dan tentu saja ini dapat memicu benih-benih terorisme,” tegas Nurhayati dalam rilis yang diterima Parlemen, Selasa (15/5).

Lebih lanjut, politisi F-Demokrat



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

Foto: Ojji/hr

ini mengatakan dunia internasional telah gagal menghentikan kebijakan-kebijakan provokatif Trump. Dirinya juga mempertanyakan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, justru

dinilai santai terhadap kebijakan Trump tersebut.

Menurutnya, jika PBB tidak bersikap tegas dan menentang kebijakan Donald Trump, maka sentimen anti-AS akan meluas dan dapat memicu tumbuhnya benih-benih terorisme.

“Protes ribuan rakyat Palestina atas langkah AS itu telah merenggut puluhan nyawa dan melukai ratusan lainnya. Penjahat Israel secara telanjang kembali melakukan pelanggaran HAM. Masa depan perdamaian akan semakin suram. Situasi kawasan akan terus bergejolak. PBB harus secepatnya turun tangan,” seru Nurhayati.

Presiden *International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan Presiden *GCIAD (Geneva Council for International Affairs and Development)* ini juga mendesak DK PBB segera menggelar pertemuan darurat untuk merespon kebijakan sembrono AS tersebut.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia sendiri telah mengemukakan sikap keras kebijakan AS. Namun, kecaman saja tidak

Kecamatan Gubeng. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat 2 orang sedang berboncengan menaiki sepeda motor menuju gereja. Satu pelaku yang dibonceng terlihat membawa ransel yang diduga berisi bom. Ledakan keras terdengar hingga radius 100 meter. Dua polisi yang berjaga di Gereja Santa Maria Tak Bercela ikut menjadi korban.

Serangan bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Sejumlah saksi sempat melihat wanita bercadar membawa dua anak balita memasuki halaman gereja. Ibu dan dua anaknya yang berupaya masuk ke ruang kebaktian ini sempat dihalau oleh seorang sekuriti di pintu masuk GKI Jalan Diponegoro Surabaya, sebelum kemudian ketiganya meledakkan diri di halaman gereja.

Serangan bom ketiga terjadi di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. Saksi mata menuturkan ledakan terjadi dari tempat parkir kendaraan. Diduga serangan bom mobil. Api langsung membumbung tinggi di lokasi kejadian. ■ **dep/sc**

cukup. Karenanya, ia mendesak Kemenlu segera memanggil Duta Besar AS.

“Saya apresiasi kecaman pemerintah kita. Tapi saya minta Duta Besar AS segera dipanggil dan sampaikan kepadanya nota protes keras. Pemerintah juga harus mendesak PBB melakukan penyelidikan atas tewasnya puluhan demonstran Palestina akhir-akhir ini. Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih maju,” tegas politisi dapil Jatim V ini.

Di sisi lain, DPR melalui BKSAP telah dan secara konsisten akan terus menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen, seperti PUIC (*Parliamentary Union of Islamic Countries*) dan IPU (*Inter-Parliamentary Union*) agar segera mengambil langkah konkrit terhadap kebijakan AS itu.

“Saya dan Delegasi DPR seperti di IPU (forum parlemen dunia) dan PUIC (forum parlemen negara-negara OKI) serta AIPA (forum parlemen ASEAN) konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC pernah saya kritik perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina. Saya pernah tegaskan bahwa persatuan negara-negara Arab dapat berkontribusi besar mewujudkan kemerdekaan Palestina,” tandasnya. ■ **ann/sc**

Mendapat Legitimasi AS, Tindakan Israel Seperti Sebuah Genosida

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi Munawar mengecam keras tindakan Israel yang telah membunuh lebih dari 55 warga Palestina di perbatasan Israel. Ironisnya ini terjadi bersamaan dengan prosesi pembukaan Kedubes AS di Yerusalem.

“Israel menembaki warga Palestina dengan brutal dan membabitkan ke segala arah. Bukti bahwa negara tersebut telah sengaja melakukan tindakan ‘genosida’ dan pembunuhan terencana,” kata Rofi Munawar dalam rilisnya kepada Parlemen, Selasa (15/5).

AS harus bertanggung jawab atas seluruh peristiwa ini. Mereka berpesta di tengah hilangnya puluhan nyawa warga Palestina menuntut tanah mereka dikembalikan. AS telah berkontribusi dalam sejarah paling kelam dalam proses perdamaian di Timur Tengah.

Dalam peristiwa kemarin senin (14/5) dikutip dari *The Guardian* setidaknya 55 warga Palestina telah tewas dan 2.400 lainnya terluka oleh pasukan Israel pada hari paling mematikan sejak perang Gaza 2014.

“Warga Palestina telah melakukan protes selama hampir enam minggu sebagai bagian dari protes ‘hari nakba’, tetapi peristiwa kemarin jumlah korban jiwa melonjak tajam bertepatan dengan hari ketika AS membuka Kedutaannya di Yerusalem. Sungguh sangat tragis dan ironis. PBB tidak bisa hanya berdiam diri, harus segera bertindak!” geram Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan, mayoritas dari mereka yang tewas adalah demonstran tidak bersenjata. Bahkan otoritas Palestina menuduh Israel melakukan “pembantaian yang mengerikan” dan menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan pembunuhan.

“Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes atas peristiwa



Foto: Dok.BKSAP/hr

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar

tersebut dan mengambil peran aktif dalam mendorong tindakan tegas terhadap Israel yang telah melakukan pembantaian secara sistematis dan massif,” pungkas Rofi.

Lebih dari 1.200 warga Palestina ditembak dan terluka selama protes hari Senin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, korban diantaranya enam anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kematian termuda tampaknya adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Ezzaldeen Al-Sammak.

Sekitar 100 warga Palestina kini telah tewas di Gaza sejak para pengunjuk rasa memulai serangkaian pawai enam pekan lalu menuntut “Hak untuk Kembali” - hak bagi warga Palestina untuk kembali ke rumah nenek moyang mereka di tempat yang sekarang adalah Israel. ■ **hs/sc**

Anak-anak Terpapar Terorisme, Perlu Pembentukan Dunia Pendidikan

Aksi teror yang terjadi di Surabaya yang melibatkan anak usia pelajar memukul dunia pendidikan di Indonesia. Harus ada koreksi dalam sistem pembelajaran kepada anak didik.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengaku prihatin terkait pelaku bom yang melibatkan anak-anak usia sekolah. “Saya prihatin atas keterlibatan anak-anak dalam aksi teror. Ini harus diurai mengapa sampai anak-anak terlibat,” sebut Anang di Jakarta, Selasa (15/5)

Menurut Anang, tragedi bom di Surabaya juga memukul dunia pendidikan di Indonesia. Menurut dia, pelaku bom di usia anak sekolah. “Ini pukulan telak bagi dunia pendidikan kita,” sesal Anang.

Lebih lanjut musikus asal Jember ini menyebutkan, pemerintah harus semakin meningkatkan penguatan pendidikan karakter pada anak didik yang telah tertuang dalam Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. “Sekolah tidak hanya dimaknai belajar ilmu eksakta, mengejar nilai, namun lebih dari itu menguatkan karakter anak didik. Menumbuhkan rasa empati, gotong royong, dan kepedulian. Ini nilai yang harus ditanamkan bagi anak didik,” cetus Anang.

Selain itu, Anang juga menyoroti hubungan antara pihak sekolah dan wali siswa. Menurut dia, hubungan pihak sekolah dengan wali siswa harus terbangun dengan baik. Pola komunikasi yang baik, kata Anang, pihak sekolah akan mengetahui kondisi dan latar belakang siswa dan wali siswa. “Hubungan pihak sekolah dengan wali siswa mestinya terbangun dengan



Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah

baik. Setidaknya masalah di rumah siswa akan diketahui pihak sekolah,” ingat Anang.

■hs/sc

Komisi III Apresiasi Capaian PT Sumsel

Komisi III DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang mendapat indeks kepuasan publik terbaik. Saat ini, Komisi III konsen memberi perhatian pada kinerja semua lembaga peradilan di Tanah Air. Dengan kinerja yang baik, akses keadilan bagi masyarakat pun semakin baik.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengemukakan hal itu saat mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (8/5).

“Kita apresiasi Pengadilan Tinggi Sumsel yang mendapat indeks kepuasan publik yang luar biasa. Jarang sekali ada lembaga peradilan yang mendapat apresiasi seperti itu,” kata Arteria.

Arteria mengaku, konsen melihat berbagai perubahan kinerja lembaga penegak hukum untuk memastikan tingkat kepuasan publik dan akses keadilan sesuai harapan semua pihak.

Anggota F-PDI Perjuangan DPR ini mencontohkan, ada kasus narkoba yang

tersangkanya divonis delapan bulan oleh pengadilan negeri, tapi kemudian divonis delapan tahun oleh Pengadilan Tinggi Sumsel.

Vonis hukum yang tegas dan maksimal membuat para pihak yang berperkara, terutama tersangka kasus narkoba begitu segan dan takut pada Pengadilan Tinggi Sumsel ini.

Pada bagian lain, Arteria juga mengemukakan kasus tanah yang bersentuhan dengan tanah milik Pemda. Misalnya, banyak lahan untuk fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) diklaim perorangan dan merebutnya dari



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

penguasaan Pemda.

Banyak yang bermain dengan otoritas pengadilan untuk mengambil alih lahan Fasos Fasum. “Banyak sekali tanah Pemda yang sudah digunakan untuk Fasos-Fasum, dengan menggunakan putusan hakim bisa diambil menjadi milik perorangan. Kini teman-teman pengadilan sudah satu frekwensi untuk mengamankan itu semua,” ungkap Arteria lebih lanjut. ■mh/sf



Foto: Dok/hr

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto saat mengikuti *ground breaking* pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang

Industri Pupuk Harus Efisiensikan Ongkos Produksi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk tanah air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (*cost production*) yang lebih efisien. Hal itu diungkapkannya terkait *ground breaking* pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Palembang.

“ Dengan adanya persaingan di era globalisasi ini, Pupuk Pusri harus bisa mengikuti tren globalisasi. Salah satunya terkait efisiensi ongkos produksi atau *cost production* nya. Dengan mengefisiensikan biaya produksi industri pertanian akan membuat petani lebih mudah menjangkau pupuk dengan harga yang relatif murah,” kata Dito dalam siaran persnya, Jumat (11/5).

Dengan kata lain, Dito berharap, Pusri bisa menjalankan *Public Service Obligation* (PSO) atau kewajiban pelayanan publik yang baik bagi masyarakat tani. Hal

itu sekaligus bisa mengurangi beban dari pemerintah.

Dijelaskan politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, pupuk Indonesia nantinya tak akan lagi mendapat subsidi. Subsidi pupuk ditransformasi menjadi subsidi langsung ke petani melalui Kartu Tani. Sehingga, proses produksi pupuk diharapkan lebih efisien ke depannya. “Ini bisa juga mengurangi subsidi daripada pemerintah. Sekarang kan masih disubsidi,” tutur Politisi Partai Golkar itu.

Ground Breaking pabrik NPK di PT Pupuk Sriwijaya itu bersamaan dengan

peluncuran program vokasi industri di Sumatera bagian selatan oleh Kementerian Perindustrian. Vokasi industri dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK dan menyesuaikan keahlian sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan industri.

Program tersebut melibatkan 48 industri dan 176 SMK dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. ■ **ayu/sc**

MKD DPR Nilai Positif Kunjungan Siswa ke DPR RI



Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR RI TB. Soenmandjaja menerima siswa-siswa SD Global Mandiri, Cibubur, di Ruang Rapat MKD gedung Nusantara II DPR RI



**Wakil Ketua Mahkamah
Kehormatan (MKD) DPR RI
TB. Soenmandjaja menilai
positif kunjungan siswa-siswi
sekolah ke DPR RI, termasuk ke
ruang rapat MKD. Hal tersebut
diungkapkannya usai menerima
siswa-siswi SD Global Mandiri,
Cibubur, di ruang rapat MKD,
Senayan, Jakarta, Rabu (9/5).**

“Sebenarnya kunjungan siswa ke lembaga-lembaga negara ini bukan yang pertama kalinya. Sudah sejak lama sekolah menggelar kunjungan-kunjungan ini, kalau dulu namanya studi wisata atau karya wisata. Dan itu menurut saya sangat positif,” ujar Soenmandjaja.

Ditambahkan politisi PKS ini, dengan adanya kunjungan para siswa ke lembaga-lembaga negara akan semakin memperkenalkan lembaga negara beserta tugas dan fungsinya kepada generasi muda. Hal itu sekaligus menghilangkan *image* ‘seram’ terhadap sebuah lembaga negara.

“Biasanya kunjungan seperti ini akan terekam dan menjadi sebuah kenangan bagi para siswa, sehingga bukan tidak mungkin dapat menjadi inspirasi ke depan untuk mendalami atau ikut berkiprah dalam panggung politik Tanah Air untuk ke depannya. Karena kami menyadari bahwa suatu saat tongkat estafet kepemimpinan bangsa akan beralih ke para siswa tersebut sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa,” paparnya.

Pada kesempatan itu, selain diperkenalkan tentang MKD termasuk di dalamnya penjelasan tentang tugas dan fungsinya alat kelengkapan dewan yang bernama MKD ini, para siswa juga mendapat kesempatan untuk diperlihatkan situasi persidangan MKD dalam sebuah simulasi sidang MKD.

Tidak lupa pada akhir pertemuan terjadi tanya jawab dari para siswa. Bahkan MKD pun menyiapkan sejumlah hadiah kecil bagi para siswa yang dapat menjawab pertanyaan tentang DPR RI dan MKD dengan benar dan baik. Terlihat raut wajah bahagia dari para siswa usai pertemuan tersebut.

Sebelumnya oleh staf Bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR RI para siswa diajak berkeliling gedung DPR RI dan diperlihatkan ruangan-ruangan yang selama ini menjadi tempat Anggota DPR RI menggelar sidang-sidangannya. **layu**

Foto: Eno/hr



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Foto: Singgih/hr

Tindak Tegas Produsen dan Pengedar Makanan Mengandung B3

Dalam rangka menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat, legislator Imam Suroso bersama Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Semarang Endang Pujiwati, Jumat (11/5) lalu melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Pasar Baru, Pati, Jawa Tengah.

Imam Suroso dalam kesempatan itu melihat langsung berbagai dagangan yang dijajakan pedagang kelontong, pedagang ikan maupun jajanan pasar. Saat sidak ini masih dijumpai beberapa jenis makanan yang mengandung pengawet, pewarna

termasuk formalin.

Tim Badan POM yang membawa lab mini mengambil beberapa sampel dan diketahui ada yang tidak memenuhi syarat. Atas temuan ini, Imam Suroso menekankan sidak seperti ini perlu dilanjutkan apalagi menjelang puasa dan

Komisi IX Harap Pemerintah Pusat Intervensi BLK Ende

Kondisi peralatan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai sudah tua dan banyak yang rusak. Bahkan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba mengharapkan ada intervensi dari pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap ada intervensi dari pemerintah pusat. Karena menurut kami BLK ini tidak saja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar. Tapi juga diharapkan dapat menciptakan orang-orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri,” jelas Julianus di sela-sela meninjau BLK bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IX di Ende, NTT, Jumat (4/5).

Ia sangat mendukung keberadaan BLK ini, karena menurutnya Ende ini merupakan salah satu sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dan kebanyakan PMI ini tidak sesuai dengan harapan di



Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba bersama Tim Komisi IX DPR meninjau Balai Latihan Kerja di Ende, NTT

Foto: Suci/hr

negara penempatan.

Artinya, lanjut politisi Partai Golkar ini, skill-nya tidak sesuai dengan apa yang akan ditugaskan. “Karena itu juga kami berharap nanti BLK ini membuka program studi untuk semua jenis

Kebanyakan BLK yang ada ini hanya pelatihan otomotif dan jahit menjahit. Sementara PMI yang akan bekerja itu adalah pekerja rumah tangga

lebaran konsumsi makanan dan minuman akan meningkat tajam. Politisi PDI Perjuangan ini menekankan agar kontrol terhadap makanan dan minuman terus dilakukan.

“Saya minta produsen dan pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) harus ditindak tegas. Jangan sampai rakyat diracun gara-gara mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kedaluarsa maupun berpengawet,” tandas Mbah Roso panggilan akrab Imam Suroso.

Endang Pujiastuti menambahkan, sidak telah dilakukan di beberapa Kabupaten di Jateng. Sidak kepada para pedagang sifatnya pembinaan dan edukasi. Kalau menemukan kasus masih ditunggu dua bulan, setelah itu barangnya dimusnahkan. Langkah selanjutnya mencari produsennya kalau ditemukan dan terbukti maka sanksi tegas akan diterapkan. ■ mp/sc

pekerjaan yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Pasalnya, terang Anggota Dewan dapil NTT ini, kebanyakan BLK yang ada ini hanya pelatihan otomotif dan jahit menjahit. Sementara PMI yang akan bekerja itu adalah pekerja rumah tangga.

“Pekerja rumah harus bisa membedakan mana yang namanya rice cooker, mana yang namanya magic com. Dan untuk menyetryika juga dia harus tahu berapa persen panas untuk suatu pakaian, sesuai label yang ada pada label baju tersebut. Agar mereka tidak salah dan tidak dimarahi oleh majikannya,” paparnya.

Menurutnya, inilah yang diperlukan dalam BLK itu, tidak hanya yang besar-besar seperti buka bengkel, tapi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu juga sangat diperlukan.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan di Kementerian Ketenagakerjaan selain ada program Desa Migran Produktif (Desmigratif), juga ada program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“TKM ini kami harapkan, mereka bisa berada di Desa Migran Produktif. Supaya orang-orang desa tidak perlu mencari pekerjaan ke luar desanya, tetapi dapat menciptakan pekerjaannya sendiri dan bagi orang lain. Mudah-mudahan semua temuan kami dalam kunjungan ini bisa kami bahas di Komisi IX dengan kementerian terkait nanti.” tutupnya. ■

sc/sf

Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Elektronik Belum Sempurna

Ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi XI DPR RI terkait penerapan kebijakan sistem pembayaran elektronik, diantaranya menyangkut masalah perlindungan konsumen yang masih belum sempurna. Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi XI ke Provinsi Sulawesi Selatan.



Anggota Komisi XI DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi

terkait sistem pembayaran elektronik,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Jasa Keuangan BI, inklusi Indonesia sudah mencapai 67 persen, tetapi tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga atau industri keuangan masih 26 persen. Artinya orang banyak menggunakan lembaga keuangan yang ada tetapi tidak memahami aturan main yang ada di dalam lembaga keuangan tersebut, sambung Nur Purnamasidi.

“Ini potensi yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menipu masyarakat. Oleh karenanya pemerintah harus mendorong agar ada peningkatan literasinya hingga minimal mencapai 50 persen,” tegasnya.

Ia mengatakan, pemerintah harus berinisiatif bersama-sama dengan DPR untuk membuat regulasi tentang transaksi elektronik yang bisa menjamin secara keseluruhan regulasi tentang sistem pembayaran elektronik.

“Regulasi harus lebih ke depan, karena ketika terjadi sengketa maka ada sandaran atau perlindungan hukum. Kalau regulasinya belum ada tetapi sudah dilaksanakan tanpa perlindungan hukum, maka ketika terjadi sengketa yang dirugikan adalah masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, harus ada percepatan antara keinginan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat dengan tingkat kecepatanantisipasi dan respon yang baik dari pemerintah khususnya BI.

“Karena kalau tidak, berarti kita membiarkan masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari pemerintah,” pungkas anggota dewan dapil Jawa Timur IV ini. ■ as/sc

“Hal itu terbukti dengan masih banyaknya warga masyarakat yang memiliki kendala di lapangan. Seperti pada kasus pembobolan Bank BNI, yang menyangkut masalah e-Banking. Dengan tidak kuatnya sistem yang dibangun oleh perbankan kita, membuat persepsi di masyarakat bahwa sistem keuangan yang ada di dalam perbankan kita belum sepenuhnya serius,” ucap politisi Fraksi Partai Golkar ini, di Makassar, Sabtu (12/5).

Menurutnya, hal itu akan berdampak pada ketidakantusiasan masyarakat untuk menggunakan transaksi elektronik. “Perlu ada regulasi yang lebih tinggi, tidak cukup hanya peraturan Bank Indonesia. Tetapi perlu dimunculkan suatu undang-undang yang mengatur khusus tentang transaksi elektronik, agar lebih kuat dan bersifat memaksa kepada seluruh industri keuangan yang ingin menerbitkan atau memproduksi beberapa perangkat yang

Ketua Komisi I Kutuk Langkah AS Buka Kedubes di Palestina

Hari ini di Palestina terjadi dua peristiwa besar yakni pertama di perbatasan Gaza terjadi pembantaian terhadap puluhan warga Palestina oleh Zionis Israel yang menyebabkan ribuan orang terluka. Kedua, yakni pembukaan kedubes AS di Palestina.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah AS tersebut dan menyampaikan duka mendalam kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban kebiadaban Israel

“Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun di sisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina,” jelas Kharis dalam

keterangan tertulis kepada media, Senin sore (14/05).

Langkah AS seperti membuka kotak pandora krisis Timur Tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan, dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia. Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

“Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada,” tegas Kharis.

Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelas mengganggu perdamaian dunia yang



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

Foto: Rizka/hr

selama ini diperjuangkan Amerika juga. “AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika sendiri menggagasnya, perlawanan akan semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga, Amerika harus menghentikan langkahnya,” tegas legislator asal Solo ini. ■ hs/sc

Standar Nasional Pendidikan Harus Ditinjau Ulang

Dua hal dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), perlu mendapat perhatian untuk dikaji ulang. Pertama mengenai standar proses yang memberlakukan bahwa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) maksimum berjumlah 28 orang di setiap kelas.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai pada kenyataannya saat ini sekolah yang memiliki kondisi siswa berjumlah 40 orang setiap kelasnya, jumlahnya masih sangat banyak. Begitu pula dengan yang berada di jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MK.

“Jika ini benar-benar diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 tahun 2016, maka akan sangat memerlukan biaya yang sangat besar,” tandas Ferdi, sapaan akrabnya, di Gedung Parlemen,

Senayan, Jakarta, Kamis (17/5).

Berdasarkan perhitungan, lanjutnya, dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas baru adalah sejumlah tidak kurang dari Rp18,1 triliun. “Hal ini menjadi satu bukti bahwa ketika membuat kebijakan, sebaiknya tidak dihitung berdasarkan kebutuhan anggarannya. Hal yang perlu menjadi perhatian sebelum mengambil keputusan adalah seharusnya melibatkan para pemangku kepentingan termasuk DPR RI,” tegasnya.

Ferdi mengatakan, permasalahan



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Foto: ojie/hr

kedua adalah tentang Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS 2018) yang juga harus ditinjau kembali. Hal itu terkait dengan rincian penggunaan dana BOS yang seharusnya bisa lebih terukur.

“Meningat masih banyaknya aturan dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS, pihak Kepala Sekolah takut untuk menggunakannya. Hal itu dikarenakan petunjuk penggunaan dana kurang terinci dengan baik,” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut. ■ dep/sf



Foto: Eka/hr

Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir saat wawancara dengan awak media Parlementaria di Lapas kelas II A Kendari, Prov. Sultra

Penghuni Lapas Didominasi Napi Narkoba

Masalah narkoba menjadi masalah klasik yang masih dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hampir 60 sampai 70 persen penghuni di seluruh lapas yang ada adalah napi kasus narkoba. Komisi III DPR RI merasa heran karena hingga saat ini belum ada laporan konkrit baik dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari pemerintah terkait *over capacity* masalah tahanan narkoba tersebut.

“ Karena intinya *over capacity* ada di narkoba. Kalau narkoba tidak ada mungkin akan lebih nyaman,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir usai mengunjungi Lapas Kelas II A Kendari, Provinsi Sultra, Selasa (08/5). Dalam APBN tahun 2017 yang lalu

telah dianggarkan dana kurang lebih 3 triliun untuk Kemenkumham. Tetapi Kemenkumham tidak berani mengambil dana tersebut untuk merenovasi lapas, lanjutnya. “Hanya digunakan Rp 700 miliar untuk penambahan sumber daya manusia. Termasuk CPNS yang baru,” ucap politisi Fraksi Golkar itu.

Adies juga mengatakan, salah satu tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR ke Lapas Kelas II A Kendari adalah untuk menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan tugas-tugas di Kanwil Kemenkumham, maupun mitra kerja lainnya seperti Kejaksaan Tinggi dan BNNP Provinsi Sultra.

“Hal ini dilakukan dalam upaya melakukan proses penegakan hukum, serta ingin mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota

Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio juga menyampaikan bahwa akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kementerian/lembaga maka renovasi lapas tersebut belum bisa direalisasikan. “Kalau dilihat memang mengesankan. Bayangkan mereka tidur bersusun, jadi mereka tidak bisa tidur dengan layaknya. Bayangkan yang kapasitas satu kamar untuk 9 orang ini, diisi oleh 18 sampai 21 orang. Termasuk yang wanita juga. Oleh karenanya Komisi III DPR selalu mendorong terus persoalan ini kepada Kementerian Hukum dan HAM, tapi alasannya klasik, yakni masalah anggaran,” tutur Ichsan.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan mengalami *over capacity*, hanya beberapa provinsi saja yang tidak, sambungnya. “Kita berharap ke depannya akan ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Kendari Sofyan memaparkan bahwa mereka memiliki 14 UPT, antara lain 4 lapas, 4 rutan, 3 kantin, 2 lapas dan satu rubasar. “Kami juga sampaikan, daftar orang asing yang ada di kami secara sistem ada sejumlah 1286 per 30 April,” ujarnya. ■ hr/sc

Komisi IX Soroti Masalah Kematian Bayi Dan Gizi Buruk Babel

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawaty menyoroti angka kematian bayi serta masalah gizi buruk (*stunting*) di Provinsi Bangka Belitung (Babel). Berdasarkan data profil kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Babel, bahwa angka kematian bayi dan balita (Akaba) di Kabupaten Belitung paling tinggi di Provinsi Babel.



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawaty

Foto: Iwan/hr

“Untuk kematian bayi mencapai 14 bayi per 10 ribu kelahiran, kemudian balita 12 anak per 1000 anak. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut, program generasi emas 2035 yang telah dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai,” ungkap Okky disela-sela Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI menggelar diskusi dengan jajaran Pemkab Belitung, di Kantor Bupati Belitung, Lesung Batang, Babel, Rabu (2/5).

Menurut Politisi PPP itu, tingginya angka kematian tersebut memiliki hubungan dengan persentase cakupan kunjungan ibu hamil yang rendah serta kurangnya tenaga bidan yang memiliki kompetensi. Ia juga mempertanyakan evaluasi program 1000 hari kehidupan

hingga intervensi pihak terkait dalam menekan kasus *stunting* di Belitung.

“Apa yang saya temukan ternyata di Belitung ini belum ada klinik Therapeutic Feeding Centre (TFC). Karena bagaimanapun kurang gizi walaupun satu orang harus diperhatikan secara serius,” ujar Okky.

Sementara ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Belitung Suhandri mengatakan program 1000 hari kehidupan sudah dilaksanakan. Siklus mulai terjadi kehamilan hingga pasca melahirkan pun telah dikawal.

“Selama menyusui ada program pemberian ASI eksklusif dan promosi menyusui terhadap ibu. Sehingga ibu tidak memberikan makanan pengganti ASI sebelum usia enam bulan,” ungkap Kadinkes.

Tak berhenti sampai di situ, lanjutnya, dalam menekan angka *stunting* di usia balita dimonitor melalui Posyandu. Di usia anak sekolah dilakukan imunisasi, program pemberian makanan tambahan dan pemberian tablet besi. Juga ada perhatian untuk usia remaja sampai usai perkawinan. “Semua itu kami kawal dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks,” tutupnya. ■ iw/sf

Apa yang saya temukan ternyata di Belitung ini belum ada klinik Therapeutic Feeding Centre (TFC). Karena bagaimanapun kurang gizi walaupun satu orang harus diperhatikan secara serius

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bersepakat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Piagam Internal Audit Charter dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

“Dengan ditandatanganinya MoU ini kita harus berkomitmen dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan aparaturnya,” ungkap Plt Sekjen DPR RI Damayanti dalam sambutannya di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/5).

Kerja sama ini meliputi dua bidang yakni manajemen keuangan terkait pengelolaan keuangan dan manajemen pengawasan terkait peningkatan kapabilitas aparat pengawas negara.

Maya sapaan akrab Damayanti menjelaskan, kerja sama ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). DPR RI sebagai lembaga yang bertugas mengelola keuangan negara memiliki ketentuan peraturan yang mewajibkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengacu kepada satu sistem yang dikenal dengan sistem pengendalian pemerintah guna mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan penelitian-penelitian dan pernyataan *World Bank* dinyatakan bahwa ada korelasi yang kuat antara pemerintah dengan hasil pembangunan, dimana jika pemerintahannya bagus maka pembangunan akan tercapai secara akuntabel dan berkelanjutan (*sustainable*) demikian juga sebaliknya.

Di samping itu, Maya menambahkan ada target yang harus dicapai dalam kerja sama ini yakni peningkatan level kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi - JK dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dikehendaki bahwa baik aparat pengawasan internal pemerintah maupun sistem pengendalian internal pemerintah ditargetkan mencapai level 3 pada tahun 2019. Level yang diharapkan bisa punya kapasitas untuk bisa mencegah, mendeteksi, menindaklanjuti apabila ada penyimpangan-penyimpangan.

“Memang saat ini kita masih di level



Pt Sekjen DPR RI Damayanti menandatangani MoU dan Piagam Internal Audit Charter dengan BPKP

Foto: Arief/hr

Setjen dan BK DPR Dengan BPKP Tandatangani MoU Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

2. Jadi memang masih agak jauh karena untuk menaikkan level itu sehingga perlu kerja keras. Untuk itu Saya mengharapkan seluruh jajaran di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI saling bekerjasama sehingga bisa tercapai di 2019,” harap Maya.

Selain kerja sama ini, Maya mengatakan ada upaya-upaya lain untuk mewujudkan target tersebut seperti melalui berbagai pelatihan terkait untuk meningkatkan kemampuan dan belajar mengimplementasikan ilmu yang telah didapat. Sebab sebaik apapun sumber daya manusia dan program yang dimiliki tidak akan berdampak apa-apa jika tidak dapat mengimplementasikannya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BPKP Ardhan Adiperdana mengungkapkan, banyak tantangan yang akan dihadapi mengingat kondisi

birokrasi saat ini kompleks dan penuh ketidakpastian. Namun demi mencapai tujuan bernegara yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel tantangan tadi diharapkan tidak menjadi penghambat bahkan harus menjadi cambuk demi terwujudnya *good governance*.

“MoU dan Internal Audit Charter yang ditandatangani ini merupakan salah satu parameter untuk bisa mewujudkan kapabilitas APIP yang level 3 tadi sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik. Untuk itu hadapi segala tantangan yang ada sebab apabila sudah ditandatangani dan charter ini diimplementasikan tentunya prospektif reformasi birokrasi dan prospektif pengelolaan keuangan ini akan membuat organisasi efisien, efektif, akuntabel, dan transparan baik dalam rangka mengelola keuangannya maupun dalam

rangka mewujudkan tujuan atau visi misi organisasinya,” papar Ardhan.

Terakhir Ardhan menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tanggungjawab pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP). Artinya dengan sistem pengendalian ini akan tumbuh mekanisme agar pengendalian keuangan bisa akuntabel sehingga bisa digunakan untuk mencapai tujuan instansi atau organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“SPIP sudah ditetapkan dalam PP-nya ini tanggungjawab pimpinan di kementerian dan lembaga pemerintahannya yang harus mengadopsi prinsip-prinsip atau praktek-praktek untuk adanya sistem pengendalian intern mereka,” tutup Ardhan. ■ [apr/sc](#)



Deputi Bidang Administrasi Mardian Umar berfoto bersama seluruh petugas Protokol DPR, usai membuka acara Bimbingan Teknis tentang Peningkatan Kapasitas Keprotokolan

Foto: Andri/hr

Protokol DPR Diminta Beri Pelayanan Prima dan Tingkatkan Kapasitas Keilmuan

Deputi Bidang Administrasi Mardian Umar menghimbau kepada seluruh petugas protokol DPR RI untuk senantiasa memberikan pelayanan yang prima dengan terus meningkatkan kapasitas keilmuan dan etiket keprotokolannya.

“ Yang paling penting adalah memberikan pelayanan prima kepada dewan, kemudian mau menambah ilmu pengetahuan mereka sebagai tenaga protokol. Karena protokol itu kan dinamis kadang-kadang kita melayani tamu negara dari Timur Tengah, dan berbagai negara lainnya. Itu kan dinamikanya beda, tambah lagi wawasannya, dan ilmunya agar mereka bisa dengan mudah dalam melayani tamu-tamu,” ungkapnya usai membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Keprotokolan dengan tema ‘Etiket dan Keprotokolan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Dewan’, Senin (14/5).

Lebih lanjut, Mardian menegaskan bahwa peningkatan kapasitas keilmuan dan etiket diperlukan karena karakteristik tamu dan pejabat yang dilayani berbeda-beda. “Begitu juga dengan anggota dewan. Dewan dengan 565 Anggota itu dia punya karakter yang berbeda-beda. Tapi semuanya harus dilayani. Yang paling penting anggota dewan ini statusnya secara UU Keprotokolan ini jelas, harus diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” paparnya.

Dalam acara yang menghadirkan narasumber Protokol Sekretariat Kepresidenan RI Fathurrohman tersebut,

Mardian mengungkapkan bahwa kekurangan yang dimiliki oleh Protokol DPR RI adalah masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada saat ini

Diketahui saat ini Protokol Bandara Soetta berjumlah 22 orang, Protokol Bandara Halim berjumlah 10 orang, sementara Protokol Sekretariat Komisi berjumlah 14 orang. Dengan jumlah yang ada saat ini, masing 4 orang protokol bandara bekerja selama 8 jam dengan 3 shift.

Hal ini yang menjadi sorotan Deputi Administrasi Mardian Umar. Menurutnya, jika saja di saat reses berlangsung dikerahkan 8 petugas protokol sekaligus maka, akan meminimalisir kekurangan yang ada. “Kalau berbarengan ada reses misalnya cuma 4 kalau di full-in 8 lah yang datang mungkin sekali jalan 50 ya luar biasalah, dan itu hal yang harus kita jawab, dengan keterbatasan anggaran dan SDM ya pelan-pelan lah kita benahi,” ujarnya.

Di lain sisi, Mardian juga mengapresiasi dan mengaku bangga atas kinerja Protokol DPR RI. Selain memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada anggota dewan, dirinya meminta Petugas Protokol harus memahami psikologis dan kebiasaan dari anggota dewan yang sedang dilayani. ■

ndy/sc



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memimpin delegasi DPR RI bertemu dengan Sekretaris Perdagangan Negara, Kementerian Luar Negeri Kerajaan Denmark Susanne Hyldelund, di Kopenhagen, Kerajaan Denmark, Senin (15/5). Foto: sofyan/hr



Wakil Ketua Fadli Zon menerima persaudaraan alumni 212 (kanan) dan mantan kepala desa Bogor beserta timnya (kiri) di Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (17/5). Foto : Oji/hr



Tim Monitoring Evaluasi Buletin dan Majalah Parlemenaria Setjen dan BK DPR Ri ke RSUP Fatmawati, Jakarta Senin, (14/5) Foto : Kahfi/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mau motor zaman now?

IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY

MEME (gambar, karikatur, video)

ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:

19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018

PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now
Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,
Juara III Rp 5 juta

SAAT PENGUMUMAN

DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY

KIRIM KE:



lombakritikterbaikDPR@gmail.com



lombakritikterbaikDPR@yahoo.com



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)